



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Desa

**Nadia Fransiska Amboisa^{1*}, Antonia Eka Pradita², Agustina Bete Iku³,
Angelika Yuni Pratiwi⁴**

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia | nadiaamboisa@gmail.com¹

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia | antoniaekapradita@gmail.com²

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia | agustinabeteiku110@gmail.com³

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia | angelikayunipratiwi0@gmail.com⁴

Correspondence Author*

Abstract

The main focus of this research is community empowerment in Tiong Keranjik Village, Belimbing Hulu subdistrict, Melawi district, West Kalimantan through the food security program. The aim of this research is to analyze the impact and success factors of the community empowerment program in the context of the development of the Tiong Keranjik village. The research method used included document analysis to obtain a comprehensive picture of the implementation of community development programs through empowerment. This research shows that making village communities independent (empowered) through food security programs has a very positive impact. With adequate resources, and better market access, local farmers can increase their productivity and income. Apart from that, the action program also strengthens human capacity to utilize natural products continuously by emphasizing environmentally friendly agricultural practices. However, the study identified several challenges facing local farmers, such as climate change, which can affect crop yields and market fluctuations. In addition, local social and economic factors influence the sustainability of empowerment programs. Therefore, it is recommended to improve coordination between institutions, strengthen support policies and actively involve the community in design and decision-making activities. This research makes a significant contribution to our understanding of village community empowerment in the context of Tiong Keranjik village, Melawi district. It is hoped that the policy implications of this research can help design more sustainable empowerment strategies, especially to increase community food security against external and internal challenges in the development of Tiong Keranjik village, West Kalimantan.

Keywords: *Community empowerment, food security, development*

Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat Desa Tiong Keranjik, kecamatan Belimbing Hulu, kabupaten Melawi Kalimantan barat melalui program Ketahanan pangan . Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak dan faktor keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan desa tiong keranjik. Metode penelitian yang dilakukan meliputi analisis dokumen untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa memandirikan masyarakat desa (berdaya) melalui program ketahanan pangan memberikan dampak yang sangat positif. Dengan sumber daya yang memadai, dan akses pasar yang lebih baik, petani lokal dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selain itu, program penindakan juga memperkuat kapasitas manusia dalam memanfaatkan hasil alam secara terus-menerus dengan menekankan praktik pertanian ramah lingkungan. Namun studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi petani lokal, seperti perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi hasil panen dan fluktuasi pasar. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi lokal mempengaruhi keberlangsungan program pemberdayaan. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat kebijakan dukungan dan secara aktif mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perancangan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks desa Tiong Keranjik kabupaten Melawi. Implikasi kebijakan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu merancang strategi pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, terutama untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat terhadap tantangan eksternal dan internal dalam pembangunan desa Tiong keranjik Kalimantan barat.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, Ketahanan pangan, dan Pembangunan

Pendahuluan

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan desa di Indonesia. Pembangunan desa Tiong Keranjik Kabupaten Melawi Kalimantan Barat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan. Pengembangan kawasan pertanian merupakan salah satu cara untuk mengatasi tantangan kebutuhan pangan saat ini dan masa depan, terlebih lagi di Desa Tiong Keranjik didominasi oleh sektor pertanian.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan pertanian dalam pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Hoerudin, 2023). Dengan bantuan kegiatan pertanian yang berkelanjutan dan kompetitif, masyarakat desa dapat memperoleh pendapatan yang stabil, meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. Teknologi pertanian modern seperti irigasi otomatis, sistem budidaya yang efisien dan penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas dan hasil serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar dan keberlanjutan seluruh ekosistem (Rahmat et al., 2023).

Pemberdayaan perempuan dan pemuda di bidang pertanian pedesaan melalui pelatihan kejuruan juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam produksi tanaman, peternakan, dan pertanian (Haryanti & Soebiantoro, 2023). Selain itu, pemerintah desa juga berperan penting sebagai pemberi pelayanan, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat pertanian agar masyarakat petani mandiri dan kuat dalam menghadapi kesulitan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat di sektor ketahanan pangan berupaya menjadikan masyarakat petani mandiri dan berdaya dalam mengatasi kesulitan.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian memerlukan sinergi antara pemerintah desa, LSM, koperasi, serta lembaga pelatihan dan penelitian pertanian (Masbullah et al., 2023). Selain itu, pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian juga memerlukan upaya peningkatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan masyarakat di bidang pertanian padat karya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan secara signifikan.

Kajian Literature

1. Teori Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan adalah pembangunan suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan untuk menggapai masyarakat yang sejahtera (Afifuddin, 2010) dalam (Akbar et al., 2019). Secara umum Pembangunan di maknai sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Makna Pembangunan sebagai bentuk kemajuan berarti menyangkut masalah proses panjang dengan segala kompleksitasnya, sejalan dengan dinamika Masyarakat sebagai obyek dan subyek Pembangunan. Oleh karena itu, untuk meporelah pemahaman yang lengkap maka dipelukan kajian holistic tetang teori Pembangunan dari berbagai perspektif.

Konsep Pembangunan Menurut Rostow, bisa diidentifikasi dari proses perkembangan Masyarakat atau negeri dari tradisional menuju kearah modernisasi. Konsep Pembangunan Masyarakat yang diperkenal Rostow pernah diimplementasikan ke dalam konsep Pembangunan nasional pada masa pemerintahan presiden soeharto. Teori Pembangunan dalam perspektif taksonomi memberikan penekanan pada aspek struktur informasi yang mendasari dalam organisasi dan memungkinkan semua pengguna untuk mengaksesnya dalam konteks keseluruhan organisasi. Perspektif taxonomi secara ekstrim dibedaan ke dalam paradigma equilibrium dan paradigma konflik (Triharyanto & Siswanta, 2023).

Dalam mencapai arah pembangunan, semua kekayaan alam harus ditelusuri, diperbaharui dan didayagunakan sebaik-baiknya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, atap hukum eksistensi desa diperkuat, sebab pemerintahan desa didasarkan pada pengakuan, pengambilan keputusan, keberagaman, kekompakan, kerja sama, kekerabatan, kebijaksanaan, demokrasi, partisipasi, integrasi pemberdayaan dan berkesinambungan.

Bidang implementasi pembangunan desa berdasarkan Pedoman pembangunan desa no. 114, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2014:

A. Pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan kawasan desa meliputi misalnya:

- 1) jembatan perahu
 - 2) jalan perumahan
 - 3) jalan antara pemukiman desa ke pedesaan
 - 4) mikrohidro tenaga pembangkit listrik
 - 5) lingkungan hidup penduduk desa
 - 6) prasarana perkotaan yang sesuai dengan kondisi perkotaan.
- B. Pembangunan, pengoperasian dan perawatan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:
- 1) air bersih skala desa
 - 2) menjaga kebersihan lingkungan
 - 3) posyandu dan pelayanan kesehatan desa lainnya
 - 4) pelayanan kesehatan serta prasarana lainnya yang setara dengan keadaan desa.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat seringkali sulit dipisahkan dari pengembangan masyarakat karena memerlukan pemahaman yang signifikan dalam pemanfaatannya di dalam lingkungan masyarakat. Pada pembahasan ini yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat adalah pemberdayaan di lingkungan masyarakat yang memang diterapkan oleh pemerintah untuk meringankan dan membantu dalam proses suatu perencanaan, pengambilan suatu keputusan dan juga pengelolaan sumber daya masyarakat lokal sehingga pada akhirnya mempunyai kapasitas dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya sangat kuat kaitannya pada keberlanjutan, yang memerlukan kondisi kemandirian ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat yang berkelanjutan dan selalu dinamis. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pada pembangunan ekonomi yang menyatukan nilai-nilai yang terkandung pada masyarakat guna menciptakan paradigma baru yang berfokus kepada masyarakat, menyeluruh, diberdayakan dan yang berkelanjutan. Pemberdayaan sebagai salah satu alternatif strategi pembangunan muncul dalam berbagai literatur dan gagasan, meskipun pada kenyataannya implementasinya belum maksimal. Pembangunan maupun pemberdayaan dalam suatu masyarakat menjadi sesuatu yang menjadi bahan banyak orang untuk dibicarakan karena berkaitan pada suatu kemajuan dan juga pada perubahan yang terjadi pada bangsa ini di masa depan, terlebih jika berkaitan dengan keterampilan masih terbilang sangat kurang yang dimiliki masyarakat, hal ini menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Noor, 2011a).

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2015) dalam (Mulyana et al., 2022), pengertian pemberdayaan yaitu sebuah proses hal yang diberikan ataupun mengoptimalkan suatu kekuasaan yang dimiliki Masyarakat baik itu kekuasaan yang arti “skill maupun bargaining power”. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang bersifat multifaset, penanggulangan kemiskinan biasanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Mardikanto juga melihat pemberdayaan masyarakat dari tiga sudut pandang, yaitu:

Pertama, mengaktifkan potensi masyarakat dengan menciptakan potensi atau iklim. Standar yang digunakan di sini adalah pemahaman bahwa setiap orang dan semua Masyarakat memiliki potensi untuk berkembang. Pemberdayaan berupaya membangun kekuatan tersebut

dengan cara mendukung, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

Kedua, meningkatkan kedudukan atau kekuasaan masyarakat (empowerment). Langkah nyata untuk memberikan kontribusi berbeda dan membuka peluang berbeda antara lain dengan upaya memperkuat komunitas agar semakin kuat.

Ketiga, penegakan juga berarti perlindungan. Dalam proses pemberdayaan, kita tidak boleh melemahkan pihak yang lemah karena mereka tidak mampu melawan pihak yang kuat. Perlindungan wajib dilihat sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk menghindari persaingan yang tidak setara dan mencegah pihak yang cenderung lebih kuat menguasai pihak yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan bermaksud kepada masyarakat semakin ketergantungan kepada program program filantropi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sumadyo (2001) dalam (Mulyana et al., 2022) merumuskan tiga kegiatan utama pemberdayaan masyarakat yaitu disebut Tri Bina, yaitu: pembangunan manusia, pembangunan komersial, dan pembangunan lingkungan hidup. Mardikanto kemudian menambahkan pentingnya pengembangan kelembagaan karena Tri Bina terlaksana dengan baik bila didukung oleh kinerja berbagai lembaga terkait. Mardikanto dan Poerwoko (2015) (Mulyana et al., 2022) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

1. Pembangunan manusia merupakan hal yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan suatu masyarakat karena merupakan ujian pertama. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa suatu tujuan dalam pembangunan adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup ataupun kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kewirausahaan merupakan investasi penting dalam pemberdayaan seluruh masyarakat, karena pembangunan manusia tidak dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, tidak menjual bahkan menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
2. Pembangunan lingkungan hidup berkaitan dengan pelestarian lingkungan fisik yang menentukan keberlanjutan investasi dan operasional (terutama ketersediaan bahan baku).
3. Perkembangan kelembagaan, yaitu. tersedianya kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan manusia, pengembangan usaha, dan pembangunan lingkungan hidup. Lembaga biasanya diartikan dalam arti sempit seperti berbagai bentuk lembaga (organisasi, kelompok). Namun lembaga mempunyai arti yang lebih luas yaitu lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan Masyarakat adalah kelompok sosial yang mempunyai kemungkinan untuk menggunakan bakatnya untuk mengembangkan berbagai peluang yang dapat memberi nilai tambah bagi kehidupannya. Permasalahannya, seringkali orang tidak bereaksi atau menyadari permasalahan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi program pendidikan luar sekolah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat melakukan proses pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien (Kartika,2015) dalam (Subekti et al., 2018).

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan amanat UU Desa berdasarkan isu-isu mendasar (radikal). Artinya, tugas tersebut diberikan berdasarkan pemahaman obyektif mengenai akar permasalahan kemiskinan di desa. Undang-undang desa memahami bahwa

kemiskinan desa bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun merupakan dampak dari paada sistem, undang-undang, dan kebijakan yang timpang dan tidak merata terhadap suatu desa. Sepanjang ini desa belum termasuk, desa digunakan sebagai sasaran program.

Hak desa untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan masyarakat secara mandiri tanpa campur tangan siapapun (self-governing community) harus berkaitan dengan tersedianya sumber daya yang cukup bisa diharapkan, mampu, dan berkualitas untuk mengelola desa. Kenyataan yang ada saat ini, kebanyakan desa masih belum memiliki kapasitas yang baik karena kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, sehingga tentu saja memperlambat percepatan pembangunan desa. Intervensi tersebut diperlukan untuk memperkuat sumber daya manusia desa akhirnya masyarakat desa mempunyai kapasitas untuk memimpin, mengatur dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat (participation) merupakan poin penting untuk keberhasilan suatu pembangunan desa. Masyarakat dilibatkan dalam inisiasi, pelaksanaan dan kepemilikan semua proses dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat secara jelas dan tegas dikatakan dalam asas Undang-Undang Desa pada Peraturan Desa ayat 3. Selain untuk mendorong partisipasi masyarakat desa, tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk menguatkan (memberdayakan) masyarakat yang terlibat. untuk memperjelas peran UU Desa, pemerintah menerbitkan PP no. 43 Tahun 2014 Pasal 128 dan PP No. 43 Tahun 2014 menekankan pentingnya partai politik, khususnya pemerintah, untuk membantu pemerintah kota dan desa. Kemudian pasal selanjutnya yaitu pasal 129 PP no. 43/2014 menegaskan bahwa tujuan bantuan tersebut adalah untuk menambah suatu kapasitas pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan didalam desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa.

Penggunaan penegakan hukum sebagai pendekatan dalam pembangunan desa diharapkan dapat mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunannya bukan sekarang, tapi cara mengembangkannya harus mempunyai visi yang kuat dan melihat ke masa yang akan datang untuk kepentingan dalam jangka panjang. Selain itu, desa dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dengan pembangunan desa yang berkelanjutan. Karena bersifat berkelanjutan maka aspek dampak lingkungan dapat diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan, dan dapat disesuaikan dengan ciri ciri yang melekat pada desa, kearifan lokal, budaya dan jati diri. Setidaknya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sumber daya paling penting pada desa dapat dijaga melalui perencanaan pembangunan yang menyertakan masyarakat didalam perencanaannya.

Pembinaan masyarakat di desa melalui paksaan menciptakan desa tu menjadi mandiri . Selama ini Desa telah mengalami berbagai perubahan dalam berbagai macam bentuk, sehingga harus dijaga dan diperkuat agar menjadi kuat, berorientasi maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis, sehingga mampu menciptakan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya pemerintahan desa yang adil dan sejahtera. UU No. 6 Tahun 2014, desa diberi kesempatan untuk mandiri melalui prinsip (pengakuan dan subsidi) dan kekuasaan desa (asal usul desa dan kewenangan atas tanah). UU Desa menempatkan diri dalam desa sebagaimana yang telah diatur dan semestinya, yaitu. situs pengembangan Pemerintahan desa merupakan partai politik yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kemandirian desa dan kesejahteraan pada desa, dan

dengan kebijakan yang diambil guna mengedepankan pengakuan dan penaklukan, maka desa tidak perlu takut akan konsekuensi dari penerapan kedua prinsip tersebut. Sebagai sasaran pembangunan, desa tidak lagi menjadi unit yang membebani tugas pokok pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Padahal, desa menjadi satuan negara yang memiliki potensi menyamai tugas negara untuk menciptakan kesejahteraan bangsa, kemakmuran bangsa, dan kedaulatan bangsa di mata warganya sendiri maupun negara lain (Ra'is, 2017).

Gagasan pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kemandirian agar masyarakat dapat bertindak, memahami dan menerapkannya dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pemberdayaan dinilai penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Iryana, 2018).

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat biasanya menyasar kelompok masyarakat rentan dan tidak berdaya sehingga setelah diberdayakan, mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya, termasuk sandang, pangan, dan papan. Selain pemenuhan kebutuhan primer, masyarakat diharapkan memiliki jangkauan terhadap sumber-sumber produktif yang dapat menaikkan pendapatan dan memperoleh barang/jasa yang bernilai baik. dapat diasumsikan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan mengambil keputusan sendiri. Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat masyarakat dan memandirikan masyarakat, khususnya kelompok lemah dan rentan. gangguan ini dapat disebabkan oleh kondisi dalam (pandangan diri) maupun kondisi luar (penindasan sistem sosial yang tidak adil). Diharapkan dengan diberdayakannya masyarakat akan sejahtera, mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemampuan masyarakat dalam hidup mandiri yang disebutkan di sini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, hak berpendapat/memilih, kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Habib, 2021).

2. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat perlu mencakup beragam peluang yang dimiliki masyarakat (Noor, 2011b) adapun beberapa faktor yang tergabung, yaitu :

1. Peran pemerintah dalam kaitannya dengan cara kerja pemerintahan hendaklah mampu beradaptasi pada tugas tersebut, mampu mewujudkan keikutsertaan, membuka dialog dengan masyarakat, mewujudkan instrumen regulasi dan mengatur prosedur pasar yang berpihak pada masyarakat kelas bawah.
2. Lembaga kemasyarakatan non-pemerintah, lembaga lingkungan hidup non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan nasional dan lokal
3. Lembaga kemasyarakatan yang bermula pada masyarakat itu sendiri dan di dalam masyarakat (organisasi kemasyarakatan lokal), seperti BPD, PKK, Karang Taruna dll.
4. Koperasi selaku platform perekonomian nasional yang pada dasarnya merupakan organisasi kemasyarakatan ekonomi dan struktur cara yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi di Indonesia.

5. Bantuan sangat penting karena masyarakat kurang mampu rata-rata mempunyai keterbatasan untuk mengembangkan dirinya dan kelompoknya.
6. Pemberdayaan perlu menimbang dalam merencanakan pembangunan nasional sebagai mekanisme yang bersifat top-down.
7. Partisipasi masyarakat harus kompeten, terkhusus dunia bisnis dan swasta

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Robbins dan Barnwell dalam Harrison (Harrison, 2011) Strategi adalah identifikasi tujuan jangka panjang yang dilaksanakan sebagai sebuah respon dan pembagian sumber daya untuk mencapai target atau tujuan. Pemberdayaan adalah proses untuk menjadikan masyarakat menjadi kompeten untuk berpartisipasi dalam berbagai peristiwa dan organisasi dan badan yang memberi pengaruh untuk hidupnya. Upaya memandirikan masyarakat berfokus agar masyarakat mendapat keahlian, ilmu pengetahuan, dan kuasa yang bisa berpengaruh bagi kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar nya (M, 2021).

Berdasarkan pendapat ahli yang disampaikan diatas, maka kesimpulannya bahwa cara atau proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang dapat kita pahami untuk dicapai maka dalam pelaksanaan proses memandirikan masyarakat harus didasarkan pada strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan. Strategi sering kali diartikan sebagai langkah atau tindakan spesifik yang harus digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Mardikanto dan Subiato dalam (Risma, 2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa program dalam melangsungkan strategi pemberdayaan, yakni:

1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Peningkatan kelembagaan kelompok;
3. Mengoptimalkan modal negara (swasta);
4. Peningkatan usaha yang bermanfaat
5. Memberikan berita yang relevan

Selain itu, ada beberapa strategi dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat diimplementasikan, diantaranya (M, 2021):

1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.
2. Agenda Pembangunan Pedesaan

Strategi pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan juga potensi yang ada di masyarakat. Dimana masyarakat juga dapat memaksimalkan kualitas diri, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri untuk menciptakan kesejahteraannya sendiri. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, penting untuk mengedepankan kesetaraan antara masyarakat dan lembaga pelaksana program pemberdayaan. Semua yang terlibat saling mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing dan berbagi pengetahuan, pengalaman dan dukungan.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel adalah Studi Kepustakaan. Metode penelitian yang dilakukan meliputi analisis dokumen untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan. Sumber data sendiri bersifat sekunder yaitu berasal dari jurnal, berita, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ketahanan Pangan dalam Pembangunan di Desa Tiong Keranjik, Kec. Belimbing Hulu, Kab. Melawi:

a. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk ikhtiar untuk masyarakat agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, harkat dan martabat kemanusiaannya sehingga mampu bersikukuh dan berkembang dengan mandiri, mulai dari segi ekonomi, sosial, agama, dan maupun budaya. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap ini pemerintah Desa Tiong Keranjik Kabupaten Melawi mempersiapkan dua hal yaitu penyiapan tenaga pelaksana pekerja masyarakat dan penyiapan lahan. Persiapan ini dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lancar.
2. Tahap Penilaian: Tahap ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan hidup atau lainnya, dengan cara melakukan survei atau studi kelayakan.
3. Tahap Penyusunan Rencana Aksi: Tahap ini meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator dan sasaran program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, fase ini juga mencakup penyusunan log frame program pemberdayaan masyarakat yang mencakup input, output, outcome, dampak, asumsi dan risiko.
4. Tahap Pemberdayaan: Pada fase ini masyarakat melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan akan diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuannya, sehingga hal ini akan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat, serta rekomendasi atas keinginannya dan bimbingan untuk evaluasi diri.

b. Aktor Pemberdayaan Masyarakat

Di Desa Tiong Keranjik, pelaku pengembangan perkebunan karet Kabupaten Melawi adalah pemerintah desa yang berperan mengkoordinasikan program-program yang ditawarkan pemerintah Kabupaten Melawi dengan kelompok tani yang terlibat dalam jalannya program yang ditawarkan. Dalam menjalankan program yang ditujukan bagi kelompok produsen pertanian, turut serta juga dalam pengawasan lapangan pertanian yang bertugas memberikan bantuan teknis. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan beberapa orangnya merupakan tokoh masyarakat serta pengurus dan juga dari keanggotaan Gapoktan itu sendiri. Dan hal ini didukung oleh lembaga kredit mikro.

c. Program dan Kegiatan Pemberdayaan

Program dan kegiatan Pertanian Kabupaten Melawi, dituangkan pada rencana strategis (renstra) dengan kisaran jangka waktu lima tahun, yaitu. 2019-2024. Program ketahanan pangan telah dilaksanakan di Desa Tiong Keranjik dalam beberapa tahun terakhir, dengan pembagian bibit karet pada tahun 2022 dan benih ikan pada awal tahun 2023. Program ketahanan ini dilaksanakan melalui pembagian benih karet dan benih ikan.

d. Sokongan Anggaran, SDM, dan Fasilitas Penerapan

Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Desa Tiong Keranjik menggunakan sumber anggaran yang berasal dari APBN dan penghasilan lainnya. Sementara itu, untuk mendanai program ketahanan pangan juga didukung oleh lembaga keuangan mikro (MFI) yang dananya sendiri berasal dari pengembangan usaha pertanian pedesaan (PUAP). Dukungan aparat terhadap pemberdayaan didasari oleh karena di Desa Tiong Keranjik sumber daya petaninya masih tergolong rendah karena kelompok tani penerima program ketahanan pangan berjumlah 150 KK sedangkan Desa Tiong Keranjik berjumlah 209.673 KK.

e. Capaian Program Ketahanan Pangan

Program memandirikan penduduk desa yang dilaksanakan di Desa Tiong Keranjik Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya ketahanan pangan dengan pemberian benih karet terapan. Pemberdayaan masyarakat yang dicapai merupakan perubahan pola pikir petani yang tidak bergantung pada satu sumber penghidupan saja melainkan bisa beragam seperti petani kelapa sawit, karet, dan padi. Hasil dari program ini juga mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial pada bidang pertanian. Sisi ekonominya yaitu, karet mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan, karena memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu karet juga dapat tumbuh pada wilayah yang tidak cocok untuk tanaman pangan, yang dalam hal ini dapat mendiversifikasi sumber pendapatan para petani dan masyarakat di daerah tersebut sehingga walaupun karet bukan merupakan tanaman pangan namun kontribusinya terhadap perekonomian dan masyarakat sangat bermanfaat. Aspek sosial dari program ketahanan pangan melalui pemberian benih karet dapat menciptakan kesejahteraan sosial di desa Tiong Keranjik. Di sana, masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan uang yang dihasilkan dari perkebunan karet.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala sesuatu yang digunakan agar dapat menunjang pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat menghasilkan capaian yang optimal. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa Tiong Keranjik, Kec. Belimbing Hulu, Kab. Melawi, Kalimantan Barat telah terlaksana dengan baik oleh karena adanya faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan program Ketahanan Pangan yang mana program tersebut merupakan salah satu program dari pemerintah setempat. Adapun faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut adalah:

1. Pemerintah Desa Tiong Keranjik: Pemerintah Desa Tiong Keranjik telah menunjukkan dukungan yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program yang dibuat yakni program Ketahanan Pangan, langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan benih bibit karet terapan bagi masyarakat untuk dibudidayakan.
 2. Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam mengolah bibit karet yang diberikan oleh pemerintah sangat berpengaruh dalam keberlangsungan program ketahanan pangan. Selain itu, masyarakat memiliki peranan penting sebagai objek sasaran dari program pembagian bibit karet, kontribusi masyarakat tersebutlah yang menjadikan program dapat terlaksana dengan baik.
 3. APBN dan LKM: menjadi pendukung dalam hal anggaran untuk keberlangsungan pembagian bibit karet bagi masyarakat Desa Tiong Keranjik.
- b. Faktor Penghambat
- Pada saat melangsungkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa Tiong Keranjik, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program ketahanan pangan itu sendiri, seperti: a) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengelola bibit karet; b) Lahan yang terbatas; c) Minimnya biaya pemeliharaan yang dimiliki oleh masyarakat; dan d) Curah hujan yang tinggi juga menjadi penghambat bagi petani karet dalam pengelolaan lahan kebun karet.

Kesimpulan

Dari hasil yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa program ketahanan pangan di Desa Tiong Keranjik Kecamatan Belimbing Hulu Kerajaan Melawi melibatkan proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi persiapan, evaluasi, perencanaan tindakan dan pemberdayaan masyarakat. Aktor pemberdayaan antara lain pemerintah desa, kelompok tani, guru pertanian, tokoh masyarakat, pengurus, anggota Gapoktan dan lembaga keuangan mikro. Program ini melibatkan pendistribusian benih karet dan benih ikan serta didukung anggaran APBN, sumber daya manusia, dan sarana produksi. Capaian yang terkait dengan pemberdayaan antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertanian berkelanjutan. Selain itu, terdapat faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat. Faktor

pendukungnya antara lain dukungan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, anggaran APBN dan lembaga keuangan mikro. Sedangkan faktor pembatasnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan lahan, rendahnya biaya pemeliharaan, dan tingginya curah hujan.

Saran

Berdasarkan penjabaran diatas maka perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan benih karet. Hal ini dapat mencakup penyediaan peralatan, fasilitas dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan pengolahan benih karet para petani. Mengoptimalkan penggunaan lahan: Diperlukan strategi untuk mengoptimalkan budidaya terbatas. Hal ini dapat mencakup teknik pertanian yang lebih efisien seperti polikultur atau penggunaan teknik pertanian ramah lingkungan. Pendanaan dan

Pembiayaan: Sistem pembiayaan yang memfasilitasi akses petani terhadap modal usaha harus dipertimbangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui program bantuan atau kerjasama dengan lembaga kredit mikro. Pengelolaan air, Akibat curah hujan yang tinggi, diperlukan perbaikan pengelolaan udara di perkebunan karet, seperti pembuatan saluran udara dan drainase yang baik. Pendidikan, Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian berkelanjutan dan efisien serta pengelolaan keuangan yang baik.

Referensi

- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 2. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i2.64>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal Wisata Islami, Makanan Halal, Wisata Islami, Dan Ekonomi Kreatif Ekonomi*, 1(2), 84.
- Harrison, K. (2011). *Strategic Public Relations: A Practical Guide to Success* (38th ed.). Palgrave Mcmillan.
- Haryanti, N., & Soebiantoro, S. (2023). Ketahanan Ekonomi Masyarakat Melalui Daur Ulang Sampah di Bangoan Collection Center Tulungagung Jawa Timur. *Journal of Community Service and Society Empowerment*, 1(02). <https://doi.org/10.59653/jcsse.v1i02.247>
- Hoerudin, D. (2023). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Klaborasi Kegiatan Belajar Mengajar Di Kober Azkiya Desa Tarumajaya, Kertasari, Kabupaten Bandung. *Journal of Community Service and Society Empowerment*, 1(01). <https://doi.org/10.59653/jcsse.v1i01.174>
- Iryana, A. B. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Di Kecamatan Comprang Kabupaten Subang. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 137. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.69>
- M, S. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya*. Gramedia.Com.
- Masbullah, M., Bahri, S. Y., Juhad, M., & Saifurruhaidi, S. (2023). Menginspirasi Generasi Muda: Membuat Tong Sampah dan Mendidik Remaja dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan. *Journal of Community Service and Society Empowerment*, 1(02). <https://doi.org/10.59653/jcsse.v1i02.248>
- Mulyana, M., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakar Di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 20–21. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2797>
- Noor, M. (2011a). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 88–89.
- Noor, M. (2011b). Pemberdayaan Masyarakat. *Journal Universitas PGRI Semarang*, 1(2), 97–98.
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi

- dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1), 39–41.
- Rahmat, T., Faujiyyah, D., Fasha, A. R., Hadidawati, H., Yusuf, D., & Anareksa, H. S. (2023). Pengembangan Keterampilan SDM Melalui Kewirausahaan Digital: Optimalisasi Gastrowisata Tape Singkong Desa Wargamekar. *Journal of Community Service and Society Empowerment*, 1(02). <https://doi.org/10.59653/jcsse.v1i02.252>
- Risma, W. D. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *E-Journal Inskripsi*, 1(1), 600–601.
- Subekti, P., Setianti, Y., & Hafiar, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kawistara*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.22146/kawistara.30379>
- Triharyanto, A. T., & Siswanta. (2023). *Teori Pembangunan (Pertama)*. UNISRI Press.